



XVI PENATALAYANAN: Gereja dan Politik

Pokok-pokok tentang **Gereja dan Politik**, **Gereja dan Ekonomi**, **Gereja dan Lingkungan Hidup** adalah bagian dari tanggung jawab pelayanan dan penatalayanan gereja di tengah-tengah dunia.

Definisi

Penatalayanan adalah tanggung jawab gereja menyangkut segala pekerjaan untuk mengurus atau mengatur kegiatan pelayanan secara bertanggung jawab; penatalayanan adalah suatu sistem dan proses pelayanan gereja dalam menatalayani segala sumber daya dan dana secara baik tertib, teratur dan bertanggung jawab.

Penatalayanan (*stewardship*) yang baik tertib, teratur dan bertanggung jawab mencakup bagaimana gereja termasuk Diaken dan Penatua membuat perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, sasaran dan tujuan, bentuk dan cara pelaksanaan, administrasi dan tata laksana, pengendalian dan pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban segala sumber daya dan dana dengan pola pikir, sikap, tingkah laku dan tindakanyang bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Alkitab dan komitmen pelayanan gereja.

GEREJA DAN POLITIK

Tujuan pemaparan bagian ini supaya Diaken dan Penatua mengerti tentang politik dalam pemahaman gereja Reformed (GMIM).

Tekad untuk kritis terlibat dalam dunia politik sebagai panggilan iman kristiani untuk menghadirkan damai sejahtera Allah sekaligus kritis melihat fenomena distorsi

(penyalahgunaan atau penyimpangan) dalam berpolitik praktis.

Pendahuluan

Di abad ke-21 ini, yang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikenal sebagai orde reformasi banyak kali mass media memberitakan betapa banyaknya rakyat Indonesia yang tidak percaya lagi terhadap partai-partai politik, tidak percaya lagi terhadap DPR karena tidak menyuarakan aspirasi rakyat, dan tidak percaya lagi kepada penguasa eksekutif yang menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan penyimpangan kekuasaan termasuk melakukan korupsi seperti “*mark up*” anggaran, gratifikasi atau penyuapan. Semakin banyak orang yang menganggap bahwa politik itu kotor!

Di tengah-tengah “badai politik” yang sedang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, warga gereja yang adalah juga warga negara menjadi bingung. Mereka sulit menentukan sikap terhadap politik yang telah dinilai begitu negatif. Dalam kondisi seperti itu, Pelayan Khusus adalah tempat mereka bertanya untuk melenyapkan kebingungan mereka dan untuk menentukan sikap!

Oleh karena itu betapa pentingnya topik Gereja dan Politik dalam materi katekisasi Pelayan Khusus GMIM.

A. APAKAH SEBENARNYA POLITIK ITU?

Kata ‘politik’ berasal dari kata ‘polis’ itu. Kata ‘politik’ itu mengacu kepada semua urusan yang berkaitan dengan polis demi kesejahteraan warga polis itu. Sehingga secara etimologis, tidak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa ia tidak punya kaitan apa pun juga dengan politik. Karena selama kita membutuhkan sandang, pangan, dsb., kita terkait dengan politik.

Bagi Aristoteles, politik haruslah memampukan manusia mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang

semaksimal mungkin dalam menggapai kebajikan tertinggi.¹ Pemikir-pemikir politik kontemporer menegaskan bahwa polis dan politik itu harus menjaga dan melindungi martabat manusia.

Mac Iver mengatakan bahwa polis itu harus menjaga ketertiban, memberi perlindungan, menjamin pemeliharaan dan pengembangan manusia.² Hal itu mencakup seluruh segi kehidupan warga Negara, seperti: aspek ekonomi, sosial, kultural, edukasi, spiritual dan sebagainya.

Berbicara tentang politik berhubungan dengan Negara, pemerintahan eksekutif, lembaga-lembaga (seperti DPR, MPR, dll.), yudikatif (kehakiman, pengadilan) proses-proses politik (seperti demokrasi, pemilukada, dll.), hubungan internasional (hubungan antar negara). Politik dibagi dalam tiga bentuk yaitu pertama politik kekuasaan (berurusan dengan teknik dan organisasi untuk memiliki kekuasaan dan mempertahankannya); kedua, politik kepedulian sosial (kemanusiaan) dan ketiga, politik kebijakan (mempengaruhi keputusan politik negara). Politik tidak bisa dilepaskan dari etika (baik dan buruk) serta strategi yang meliputi apa rancangan yang harus dibuat untuk mencapai tujuan berpolitik (kesejahteraan, kebenaran, keadilan).

Dengan demikian tidak seorang pun warga dari suatu negara yang boleh “cuci tangan” dari politik. “Pada dasarnya berpolitik menjadi hak dan tanggung jawab semua warga negara.”³ Jadi warga negara yang abstain terhadap politik adalah warga negara yang tidak bertanggung jawab!

Jadi tujuan berpolitik itu adalah mengupayakan kesejahteraan, menjaga ketertiban, memberi perlindungan, menjamin pemeliharaan dan pengembangan manusia untuk mencapai tingkat kebajikan yang tertinggi, sehingga manusia benar-benar memanusia.

¹ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 48.

² Lihat: Mac Iver, *Negara Modern*, terj. Moertono (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm. 172-173.

³ J. Soedjadi Djiwandono, *Gereja dan Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999), hlm. 48.

B. PEMAHAMAN TEOLOGIS

Dalam Alkitab banyak disebut tentang politik dan berpolitik. Kitab Samuel, Hakim-hakim, Raja-raja, Nehemia, dst., banyak menjelaskan tentang politik dan berpolitik sebagai realisasi dan masalah beriman. Di dalamnya ada ungkapan jelas tentang refleksi akibat berpolitik termasuk harapan-harapan yang perlu direalisasikan dalam berpolitik. Ungkapan-ungkapan dalam Mazmur dan para nabi tentang iman tidak bisa lepas dari kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu menghadirkan kehendak Tuhan di tengah kehidupan beriman. Dalam Perjanjian baru ungkapan Yesus *“berilah kepada Kaisar apa yang kaisar punya dan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya”* merupakan ungkapan jelas tentang separasi iman dan politik tetapi juga keterlibatan orang Kristen dalam berpolitik. Mendukung pemerintah sejauh melakukan kebaikan adalah keharusan bagi orang percaya (Rm. 13:1-7 dan 1 Ptr. 2:13-14). Tetapi dalam kenyataan ada pemerintah yang jahat di mana gereja hadir yang diungkapkan dengan bahasa simbolis dalam kitab Wahyu. 13:1-18.

Calvin adalah seorang reformator yang paling konsisten terhadap motto: **“Sola Scriptura”**, dengan menjadikan Alkitab sebagai landasan dari segala pemikiran dan releksi teologisnya. Sesungguhnya *“...Allah adalah Penguasa Tertinggi di mana saja. Karena itu, Firman-Nya juga adalah hukum bagi dunia politik.”*⁴

Jika berpolitik itu adalah mengupayakan kesejahteraan, menjaga ketertiban, memberi perlindungan, menjamin pemeliharaan dan pengembangan manusia untuk mencapai tingkat kebajikan yang tertinggi, sehingga manusia benar-benar “memanusiakan”. Maka hal itu sejalan dengan Firman Tuhan yang terdapat di Yeremia 29:7 *“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.”*

⁴ H. Henry Meeter, *Pandangan-pandangan Dasar Calvinisme*, terj. Lana Asali (Surabaya: Penerbit Momentum, 2009), hlm. 91.

Yohanes Calvin memang secara teoritis membedakan dengan tegas antara kekuasaan politik dengan Kerajaan Allah, tetapi Calvin tidak memandang politik sebagai sesuatu yang kotor dan harus di jauhi. Malahan Calvin sangat menjunjung tinggi politik itu, sehingga ia mengatakan: "...tak boleh diragukan lagi bahwa kekuasaan politis itu adalah suatu panggilan, yang tidak hanya suci dan sah dihadapan Allah, tetapi juga yang paling kudus dan yang paling terhormat di antara semua panggilan..."⁵

Calvin begitu menjunjung tinggi politik karena ia berpendapat bahwa politik itu merupakan sarana untuk menegakkan keadilan dan menghadirkan apa yang baik dan benar, melindungi orang-orang yang benar dan menghukum siapa pun yang bersalah. Dengan adanya kekuasaan politik, diharapkan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib, sehingga setiap orang dapat menjalani kehidupannya dengan tenteram.

C. BERPOLITIK PRAKTIS

Berpolitik berarti berperan-serta dalam kehidupan politik. Berperan serta dalam kehidupan politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Dapat diwujudkan melalui memberi pendidikan politik, tetapi juga bisa terjun ke dalam politik praktis, dengan ikut serta dalam upaya meraih kekuasaan. Hal itu merupakan hak dari setiap warga negara.

Pada hakikatnya semua warga negara termasuk pendeta secara pribadi memiliki hak untuk berpolitik praktis. Karena itu maka setiap warga gereja, termasuk warga gereja GMIM wajib terlibat dalam berpolitik praktis; tentu dalam tujuan mulia berpolitik (kesejahteraan, keadilan, kebenaran).

Tentu jabatan gerejawi (Diaken, Penatua, Guru Agama dan Pendeta) tidak bisa dibawa ke dalam politik praktis. Secara institusional, gereja juga mesti menunjukkan panggilan kenabian di mana sejauh pelaku politik menghadirkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, maka institusi gereja perlu

⁵ Yohanes Calvin, *Institutio*, terj. Ny. Winarsih, dkk. (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 315.

mendukung. Tetapi sebaliknya jika melanggar hal-hal ini (pemerasan, pemiskinan, ketidakadilan dalam penerapan hukum), maka menjadi panggilan gereja secara institusional untuk menyuarakan suara gereja.

Kesimpulan

1. Politik bukanlah sesuatu yang kotor, dan yang harus di jauhi.
2. Yohanes Calvin menjunjung tinggi politik dan memandang politik sebagai suatu panggilan yang paling terhormat.
3. Berpolitik itu adalah mengupayakan kesejahteraan, menjaga ketertiban, memberi perlindungan, menjamin pemeliharaan dan pengembangan manusia untuk mencapai tingkat kebajikan yang tertinggi, sehingga manusia benar-benar memanusia.
4. Berpolitik, bahkan berpolitik praktis, pada dasarnya hak setiap warga negara.

Pertanyaan untuk Diskusi:

1. Apakah saudara warga jemaat yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab jika memposisikan diri sebagai GOLPUT dalam PEMILU/PEMILUKADA?
2. a. Bolehkah seorang pendeta GMIM terlibat dalam politik praktis dengan tetap menyandang jabatan kependetaannya? Mengapa demikian? Adakah ketentuan dalam Tata Gereja GMIM mengenai hal itu?
b. Bagaimana seorang Diaken dan Penatua berpolitik sesuai pemahaman yang diuraikan dalam bagian ini?
3. Menurut saudara apa sajakah yang membuat orang negatif terhadap politik?

Daftar Pustaka

- Calvin, Yohanes, **Institutio**. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2011.
- Hall, David W., **Calvin di Ranah Publik**. Surabaya: Penerbit Momentum, 2011.

- J. Soedjadi Djiwandono, **Gereja dan Politik**. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999.
- Kuyper, Abraham, **Lectures on Calvinism**. Surabaya: Penerbit Momentum, 2005.
- Meeter, H. Henry, **Pandangan-pandangan Dasar Calvinisme**. Surabaya: Penerbit Momentum, 2009.
- Rapar, J. H., **Filsafat Politik Aristoteles**. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

